

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS
RUKUN TETANGGA DI DESA MARGAHAYU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Elza Christine P Para Pean, Daryono Daryono

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 3, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Desa Margahayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

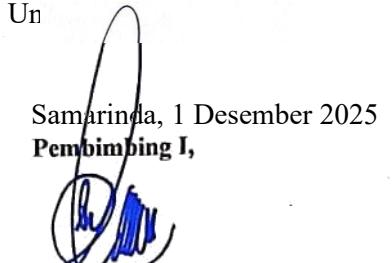
Pengarang : Elza Christine P Para Pean

NIM : 2102016092

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Un

Samarinda, 1 Desember 2025
Pembimbing I,

Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D
NIP. 19750416 200604 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik

Volume : 13

Nomor : 3

Tahun : 2025

Halaman : 947-955

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS RUKUN TETANGGA DI DESA MARGAHAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Elza Christine P Para Pean ¹, Daryono Daryono ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga melalui Program Kukar Bebaya di Desa Margahayu, Kabupaten Kutai Kartanegara serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian ini diarahkan pada implementasi Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Desa Margahayu Kabupaten Kutai Kartanegara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap Kepala Desa, Ketua RT, dan warga, serta dokumentasi dan observasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kukar Bebaya Berbasis Rukun Tetangga telah berjalan namun belum optimal. Kendala utama terdapat pada komunikasi yang kurang transparan, keterbatasan dana infrastruktur, serta koordinasi birokrasi yang masih lemah. Meskipun sumber daya manusia cukup memadai dan terdapat komitmen pelaksana, pelaksanaan program sering terbentur aturan teknis dan keterbatasan wewenang. Partisipasi warga dan dasar regulasi menjadi kekuatan utama, namun minimnya sosialisasi, pembatasan teknis, dan potensi konflik horizontal tetap menjadi hambatan. Oleh karena itu, direkomendasikan peningkatan sosialisasi, pelatihan teknis, penyederhanaan pelaporan, serta partisipasi masyarakat yang lebih aktif agar program lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Pembangunan Desa, Rukun Tetangga, Program Kukar Bebaya

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang terencana dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat atau warga negara. Hal tersebut di upayakan melalui sinergi antara pembangunan di tingkat nasional dan pembangunan di tingkat daerah. Maka dari itu pemerintah daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai penggerak untuk memberikan dukungan yang akan menentukan keberhasilan program-program nasional dalam

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: elzachristine2@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

rangka mencapai masyarakat yang sejahtera sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Optimalisasi potensi-potensi daerah tersebut dapat dilakukan dengan perencanaan yang matang dan keterlibatan berbagai pihak di dalamnya, baik pemerintah, pihak swasta dan masyarakat umum, serta memanfaatkan teknologi yang tersedia. Untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, harus dilakukan mulai dari tingkat pemerintahan masyarakat yang paling bawah, yaitu Rukun Tetangga (RT). Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kutai Kartanegara melaksanakan Program Kukar Bebaya yang merupakan sebuah program yang memberikan pendanaan sebesar RP.50 Juta per RT di Kabupaten Kutai Kartanegara yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Program Rp.50 Juta per RT menjadi harapan baru bagi desa dan kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain untuk memenuhi kebutuhan setiap RT, dana yang disalurkan juga diharapkan dapat menghidupkan kembali semangat gotong royong dan kebersamaan disetiap RT. Hal tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, pasal 5 ayat (2) yang mengatur terkait besaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) pada poin pertama yaitu program pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dalam pelaksanaannya, seperti implementasi program-program pada umumnya, program ini juga mengalami beberapa masalah atau kendala, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Margahayu dalam wawancara pada 7 Januari 2025, bahwa program pembangunan berbasis Rukun Tetangga ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan anggaran dan timbulnya konflik antar warga. Hal tersebut dikarenakan tiap desa terdiri dari banyak Rukun Tetangga dan pengelolaan dana program diatur oleh masing-masing RT. Walaupun desa juga melakukan monitoring terhadap berjalannya program, namun masih dirasa kurang maksimal untuk menjamin transparansi penggunaan anggaran tersebut. Sehingga masalah utama yang dihadapi oleh Desa Margahayu adalah kurangnya transparansi dan komunikasi terkait pengelolaan dana pembangunan berbasis rukun tetangga.

Peneliti tertarik untuk meneliti terkait Program Kukar Bebaya yang merupakan program pembangunan berbasis rukun tetangga, karena program ini memiliki skala implementasi yang luas. Program Kukar Bebaya di implementasikan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan menjangkau semua lapisan masyarakat mulai dari tingkat yang paling bawah yaitu Rukun Tetangga. Selain itu program tersebut juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji implementasi program pembangunan berbasis Rukun Tetangga di Desa Margahayu, termasuk

komunikasi antar pemerintah dan masyarakat, sumber daya pelaksana, pemahaman pelaksana dan pengelolaannya, serta koordinasi antar pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program. Sehingga program ini dapat berjalan dengan baik untuk mendukung pemerataan pembangunan mulai dari tingkat pemerintahan yang paling kecil yaitu Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Desa Margahayu Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Ayuningtyas (2014:8) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Anderson dalam Agustino (2017:17), menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Frederich dalam Agustino (2017:166) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan atau kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian yang harus dilakukan atau tidak.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Wahab dalam Iriawan (2024:125) implementasi kebijakan publik adalah kegiatan menyediakan sarana untuk melaksanakan dan memberikan dampak praktis atau akibat dari suatu tindakan. Sedangkan menurut Abdulah (2022:152), implementasi kebijakan publik mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan yang berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Sehingga berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan atau kegiatan dalam penerapan kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan memiliki beberapa model untuk menjaga kesesuaian antara kebijakan dengan apa yang diimplementasikan agar kebijakan dapat tepat sasaran. Beberapa model diantaranya adalah Van Meter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier, serta Edward III.

Program Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan yang bersifat menyeluruh (multidimensional) dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perubahan sosial, budaya, kelembagaan, serta aspek lingkungan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Siagian (2020:39), program pembangunan merupakan rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terukur untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya tertentu, program pembangunan juga mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (2019:67), program pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berencana dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, dan sosial budaya secara optimal untuk menghasilkan perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Todaro (2021:112), bahwa program pembangunan merupakan upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling humanistic, dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program pembangunan merupakan kegiatan terencana yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Program Kukar Bebaya

Menurut website resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (2021:1), Program Kuikar Beibaya merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat mulai dari tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu Rukun Tetangga (RT). Menurut Alex (2024:1) juga dijelaskan bahwa selain berfokus pada kesejahteraan masyarakat, program ini juga berfokus pada penguatan kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada dan dapat mengatasi permasalahan dalam lingkup RT mereka sendiri.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Margahayu. Informan Kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Margahayu dan Ketua RT, serta masyarakat sebagai informan.

Fokus Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini adalah ;

1. Komunikasi, di dalamnya tercakup transmisi, konsistensi, dan kejelasan
2. Sumber daya, di dalamnya tercakup sumber daya anggaran, sumber daya manusia, kewenangan, dan fasilitas

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Data primer dalam penelitian ini berupa data yang peneliti dapatkan langsung dari informan dengan alat bantu pedoman wawancara.
2. Data sekunder dalam penelitian ini peneliti dapatkan dari tempat penelitian, Buku, dan jurnal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Wawancara atau kuesioner lisan adalah dialog yang dilakukan penulis sebagai wawancara, guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam peneliti dari subjek dan informasi menggunakan pedoman wawancara.
2. Observasi digunakan untuk mengetahui keberhasilan dengan melihat dan mendengar objek penelitian.
3. Dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku arsip desa, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, serta catatan harian. Digunakan sebagai bukti peneliti telah melaksanakan penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Komunikasi

Dalam konteks penelitian ini, komunikasi dipahami sebagai kunci untuk memastikan bahwa kebijakan program pembangunan RT dapat dipahami oleh masyarakat serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Keberhasilan komunikasi dalam implementasi program ini dianalisis melalui tiga sub indikator, yakni transmisi (bagaimana informasi disampaikan), kejelasan (apakah informasi dapat dipahami), dan konsistensi (apakah informasi tidak berubah-ubah).

- a. Transmisi informasi dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis RT di Desa Margahayu telah berjalan cukup baik dan sistematis. Namun, tantangan seperti keterbatasan waktu, media komunikasi yang belum merata, serta perbedaan tingkat pemahaman warga masih menjadi kendala.
- b. Konsistensi dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Margahayu telah berjalan cukup baik pada tataran kelembagaan, namun tetap memerlukan penguatan dalam hal komunikasi publik di tingkat warga.
- c. Kejelasan telah diupayakan melalui penyampaian informasi yang disertai dengan dokumen tertulis, forum musyawarah, dan media digital. Namun dalam praktiknya, tingkat kejelasan informasi masih sangat bergantung pada kemampuan pelaksana dalam menyederhanakan isi informasi kebijakan agar sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat.

Secara umum, komunikasi dalam implementasi Program Pembangunan berbasis RT di Desa Margahayu telah dilakukan secara sistematis dan berjenjang. Pemerintah desa telah menyediakan saluran informasi yang formal dan memadai, serta melibatkan ketua RT sebagai penghubung ke masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan transmisi informasi, penyampaian

perubahan secara konsisten dan tepat waktu, serta penyesuaian bahasa dan media komunikasi agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh warga.

Hasil penelitian Fitriani (2022) juga sejalan dengan penelitian ini pada aspek komunikasi. Sesuai dengan teori Edward III, komunikasi memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan karena menjadi sarana penyampaian kesepakatan dan kejelasan kegiatan, baik antara pelaksana maupun penerima. Temuan Fitriani menunjukkan bahwa komunikasi yang kurang efektif dapat menghambat keberhasilan program, hal ini sejalan dengan kondisi di Desa Margahayu di mana transmisi, konsistensi, dan kejelasan informasi menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis RT.

Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Syahrani (2015), faktor sumber daya memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, maka program yang telah dirancang sekalipun tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam penelitian ini, hal tersebut terlihat dalam pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis RT, di mana ketersediaan anggaran, kapasitas SDM, kewenangan pelaksana, serta ketersediaan fasilitas fisik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan implementasi program pembangunan di tingkat RT.

- a. Sumber daya anggaran sebesar Rp50 juta per RT dipandang cukup sebagai stimulan awal dalam pelaksanaan program. Kepala Desa dan Ketua RT mengakui bahwa meskipun dana tersebut belum dapat mencakup seluruh kebutuhan warga, namun penggunaannya yang transparan dan partisipatif menjadi kunci efektivitas pengelolaan anggaran.
- b. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis RT di Desa Margahayu masih menghadapi tantangan dari segi jumlah dan kapasitas teknis. Kepala Desa menyebutkan bahwa pelaksanaan program sangat ditentukan oleh kekuatan partisipatif masyarakat.
- c. Kewenangan RT sudah cukup jelas, namun tetap dalam koridor pengawasan pihak desa. Kepala Desa menjelaskan bahwa Ketua RT berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan dengan batasan administratif tertentu, yang bertujuan agar pelaksanaan tetap sesuai prosedur.
- d. Fasilitas yang tersedia masih terbatas. Pemerintah desa telah memberikan dukungan administratif dan koordinatif sesuai kapasitasnya, namun sebagian besar kegiatan di tingkat RT dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara swadaya.

Berdasarkan keempat sub indikator sumber daya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembangunan berbasis RT di Desa Margahayu berjalan dengan cukup baik meskipun menghadapi keterbatasan, terutama pada aspek jumlah SDM dan fasilitas. Komitmen pemerintah desa, keterlibatan Ketua RT, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi penopang utama keberhasilan

implementasi. Hasil penelitian Fitriani (2022) sejalan dengan penelitian ini dalam hal disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Sesuai dengan teori Edward III, ukuran keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kecenderungan dan sikap pelaksana, di mana pelaksana tidak hanya dituntut untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga mampu mengimplementasikan kebijakan ke dalam kegiatan nyata. Temuan Fitriani menunjukkan bahwa sikap pelaksana yang responsif dan bertanggung jawab mendorong tercapainya tujuan kebijakan.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi merupakan indikator penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam model implementasi kebijakan menurut Edward, disposisi atau sikap pelaksana mencerminkan sejauh mana para pelaksana memiliki pemahaman, komitmen, serta kemauan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Disposisi pelaksana dalam implementasi program pembangunan berbasis RT di Desa Margahayu berada dalam kategori baik, ditandai dengan adanya komitmen, semangat, dan tanggung jawab yang tinggi. Akan tetapi, untuk mewujudkan implementasi yang lebih optimal, sikap positif tersebut perlu ditunjang dengan pelatihan, pendampingan teknis, serta peningkatan literasi kebijakan di tingkat pelaksana. Sejalan dengan teori Edward III, sikap pelaksana yang baik harus dibarengi dengan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2022), karena sama-sama menunjukkan bahwa ukuran sumber daya menurut teori Edward III tidak hanya terkait dengan sumber daya manusia, tetapi juga mencakup kapasitas lainnya seperti anggaran, kewenangan, dan fasilitas. Ketidakcukupan atau ketidaktepatan sumber daya terbukti menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan, baik pada program BST maupun pada program pembangunan berbasis RT di Desa Margahayu.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis RT di Desa Margahayu telah terbentuk dan berfungsi, namun masih terdapat kelemahan dalam hal formalitas prosedur, pemahaman terhadap alur birokrasi di tingkat masyarakat, serta kejelasan dokumentasi operasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan melalui penyusunan SOP yang lebih terstruktur, pelatihan teknis bagi pelaksana, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam memahami proses birokrasi pembangunan.

Penutup

Kesimpulan

Implementasi Program Pembangunan Berbasis RT di Desa Margahayu belum berjalan sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang masih menghadapi

kendala. Walaupun mekanisme komunikasi dan koordinasi telah dilakukan melalui berbagai media, serta dukungan anggaran dan semangat gotong royong menjadi faktor penguat, keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan teknis, dan belum adanya SOP baku menyebabkan pelaksanaan program bervariasi antar RT dan belum seragam.

Saran

1. Pemerintah desa perlu menyederhanakan sistem administrasi agar tidak membebani Ketua RT dalam pelaporan.
2. Ketua RT dan perangkat desa sebaiknya mendapat pelatihan mengenai pengelolaan dana, penyusunan laporan, dan keterampilan komunikasi publik.
3. Fasilitas pendukung seperti tempat pertemuan, media informasi, serta sarana fisik lainnya perlu ditingkatkan untuk menunjang efektivitas program.
4. Informasi program perlu disampaikan dengan bahasa sederhana melalui berbagai media, sehingga dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat.
5. Pemerintah desa bersama RT perlu menyusun SOP tertulis sebagai pedoman agar pelaksanaan program lebih konsisten dan seragam di seluruh RT.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi Program Pembangunan Berbasis RT di Desa Margahayu dapat lebih efektif, inklusif, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agung, I. 2010. Perspektif Multidimensional Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan: Pemikiran Awal Konsep dan Penerapan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(3), 281–295.
<https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/477>
- Alex. 2024. Program Kukar Bebaya : Langkah Integratif Untuk Pembangunan Berkelanjutan Kutai Kartanegara. *Jurnal Borneo*. Diakses pada Desember 2024, dari <https://jurnalborneo.com/program-kukar-bebaya-langkah-integratif-untuk-pembangunan-berkelanjutan-kutai-kartanegara/>
- Arikunto, Abdul Jabar. 2014. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Bappeda Buleleng. (2023). Teori dan Indikator Pembangunan.
<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-danindikator-pembangunan-12>
- Boonperm, dkk. 2012. Appraising the Thailand Village Fund. *Policy Research Working Paper* : 5598.
https://www.researchgate.net/publication/254073091_Appraising_the_Thailand_village_fund
- Iriawan, Hermanu. 2024. Teori Kebijakan Publik. Malang : Literasi Nusantara Abadi Grup.

- Martono, M., Dahlan, A., & Nurlaeli, I. (2024). Studi Pembangunan Ekonomi: Telaah atas Teori-Teori. *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 115–128. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/22948>
- Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa
- Portal website Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2021. Program Kukar Bebaya. Diakses pada 30 November 2024, dari <https://www.kukarkab.go.id/pemerintahan/program-strategis>
- Siagian. 2020. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta Timur : Bumi Aksara.
- Tirtanadi, Kadek. 2021. Mengkaji Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2), 6-8 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/2560>
- Tjroamidjojo. 2019. Perencanaan Pembangunan. DKI Jakarta : CV Haji Masagung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Desa
- Wahyudi, Johan. 2016. Implementasi Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT) : Pengalaman Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(10), 1-10 <https://www.neliti.com/id/publications/101292/implementasipembangunan-berbasis-rukun-tetangga-pbri-pengalaman-tata-kelola-pem>